

PRIMORDIALISME DALAM PRAKTEK DEMOKRASI DI ORGANISASI KEMAHASISWAAN(KONFLIK SOSIAL DALAM PEMIRA BEM UNESA 2020)

Haslinda Syafitri

(PPKn, FISH, UNESA) Haslinda.17040254085@mhs.unesa.ac.id

Warsono

(PPKn, FISH, UNESA) warsono@unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang primordialisme dalam praktek demokrasi di organisasi kemahasiswaan. Tujuannya adalah untuk mengetahui dan menganalisis relasi antara kepentingan primordialisme yang terjadi dengan konflik sosial pada Pemira BEM Unesa 2020. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif menggunakan metode desain studi kasus yang mengacu pada perspektif teori strukturalisme konflik Ralf Dahrendorf. Pendekatan Informan dalam penelitian ini sejumlah Empat orang yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Data dikumpulkan dengan cara wawancara mendalam dan dokumentasi. Teknik analisis data dimulai dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan selanjutnya ditarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konflik sosial yang telah terjadi dalam Pemira Badan Eksekutif Mahasiswa Unesa disebabkan enam faktor yaitu: 1) perbedaan kepentingan primordialisme, 2) ideologi Ormek, 3) perebutan eksistensi antar kelompok atau individu, 4) adanya sebuah aspek laba, 5) distribusi kekuasaan yang terjadi tidak adil dan tidak merata kemudian, 6) adanya suatu fenomena kelompok penguasa yang ingin melanggengkan kekuasaannya. Konflik terjadi menjadi dua bagian yaitu konflik vertikal seta konflik horizontal. Peran dari Ormek menjadi kelompok kepentingan sebagai aktor konflik sosial itu. Pada dasarnya dalam Ormek memiliki kepentingan primordialisme yang berbeda tetapi mempunyai orientasi yang sama akibatnya jabatan Presiden BEM Unesa menjadi rebutan banyak Ormek. Latar belakang konflik sosial BEM Unesa yang terjadi juga ditimbulkan oleh adanya pembagian distribusi kekuasaan yang tidak adil dan merata, yang akhirnya membagi dua kelompok yaitu kelompok superordinat serta kelompok subordinat.

Kata Kunci: Kepentingan Primordial, Konflik Sosial, Ormek.

Abstract

This study discusses primordialism in the practice of democracy in student organizations. The aim is to find out and analyze the relationship between the interests of primordialism that occur with social conflict in Pemira BEM Unesa 2020. This research uses a qualitative approach using a case study design method that refers to the structuralism theory of Ralf Dahrendorf's conflict perspective. Informant approach in this study the number of four people selected using purposive sampling technique. Data were collected by means of in-depth interviews and documentation. The data analysis technique begins with data collection, data reduction, data presentation, and then conclusions are drawn. The results of this study indicate that the social conflicts that have occurred in the Unesa Student Executive Board are caused by six factors including: 1) differences in the interests of primordialism, 2) Ormek ideology, 3) struggles for existence between groups or individuals, 4) the existence of profit aspects, 5) distribution the power that occurs is unfair and evenly distributed then 6) the existence of a phenomenon of a ruling group in power to perpetuate its power for the conflict that occurs into 2 parts, namely vertical conflict and horizontal conflict. The role of the Ormek as an interest group as an actor of social conflict. Basically in the Ormek it has different primordial interests but has the same orientation as the implementation of the President of the Unesa BEM, which has become a bone of contention for many Ormek. The background of the BEM Unesa social conflict that occurred was also caused by an unfair and equitable distribution of power, which eventually divided into two groups, namely the superordinate group and the subordinate group.

Keywords: Primordial Interests, Social Conflict, Ormek.

PENDAHULUAN

Berbagai upaya memerlukan representasi politik dan distribusi serta alokasi yang adil, dalam struktur sosial kehidupan orang yang menuntut agar setiap warga negara dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik untuk membentuk ruang publik. Representasi politik dan distribusi serta sumber daya politik yang adil dan menyangkut posisi kekuasaan, jabatan, hak milik, pekerjaan. keadaan ini umumnya sesuai dengan tesis

Clifford Geertz yang menunjukkan bahwa, dalam potensi penguatan identitas primordialisme, tetap hebat setelah masuk negara ke era kemerdekaan (Rozi, 2006:75).

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak kelompok etnis. Untuk alasan ini, sikap primordialisme telah terjadi oleh anggota masyarakat. kehidupan sosialnya yang sangat menganut dan mematuhi hal-hal yang telah di bawa dari kelahiran baik dalam bentuk suku, kepercayaan, ras, adat istiadat, dari daerah kelahiran, dll. Oleh karena itu, konsep nilai-nilai ini telah

melekat pada seseorang, orang yang memiliki primordialisme dalam kehidupan masyarakat akan sulit untuk berinteraksi dengan individu atau kelompok lain. Sikap ini tentu akan sangat berpengaruh dalam pembentukan persatuan dan gaya hidup yang selaras antara anggota masyarakat (Prayitno & Yanzi, 2017:3).

Dalam konteks negara, suatu bentuk demokrasi adalah pemilihan. Pemilu tak hanya diimplementasi negara agar dapat menunjuk para pemimpin dan perwakilan untuk eksekutif dan legislatif, tetapi di kampus, ada juga badan eksekutif dan legislatif (Retta, 2017:138). Pemilihan Presiden dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan legislatornya, yaitu Majelis Mahasiswa (MPM) dan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) yang dibuat langsung oleh pemilihan umum yang umumnya disebut sebagai pemilihan umum raya (Pemira).

Pemira merupakan sebuah ajang pemilihan bagi seluruh mahasiswa, pemira berjalan dinamis artinya terdapat perubahan dalam pelaksanaannya sehingga tidak serta merta berjalan lancar dari awal hingga akhir. Pemira adalah forum kompetisi antara Ormek yang beragam baik menganut ideologi Islam maupun nasionalistik (Alam, 2012:93). Selain itu, Pemira adalah acara untuk menguji kapasitas dan kualitas kerangka kerja organisasi dan menunjukkan keberadaan mereka karena siapa pun kandidat adalah representasi dari setiap organisasi. Dalam kekuatan kerangka kerja organisasi akan dievaluasi dan dipilih oleh semua mahasiswa Universitas Negeri Surabaya sehingga, jika suatu organisasi menang, itu adalah nilai tambah bagi organisasi untuk menyebarkan ideologi dan meningkatkan eksekutifnya dengan BEM sebagai instrumennya.

Universitas Negeri Surabaya (UNESA) adalah sekolah tinggi, yang dibuat pada 19 Desember 1964. Kampus Unesa mengorganisir tak hanya program kependidikan, melainkan menyelenggarakan program non-pendidikan. Adanya mahasiswa Ormawa seperti Badan Eksekutif mahasiswa universitas, Badan Eksekutif mahasiswa fakultas, Studi Departemen yang di sebut HMJ dan lainnya. Sebagai tanggapan terhadap program non-pendidikan yang diluncurkan oleh Unesa banyak mahasiswa Unesa yang ingin berpartisipasi. Karena semakin banyak kesadaran yang mereka miliki untuk keuntungan dari organisasi dan manufaktur di dalamnya (Dzulkifli & Harianto, 2017:1).

Dalam implementasinya, Ormawa *Intra-Campus* di Unesa ini menggunakan sistem demokrasi. Dia juga menunjukkan bahwa euforia dalam pelaksanaan pemilihan juga dilakukan oleh universitas, termasuk keberadaan acara pemilihan umum (pemira). Pemira tidak hanya pintu untuk memenangkan wadah saat ini dari kerangka kerja lembaga kampus, tetapi alat ini menarik kandidat kepada anggota mahasiswa organisasi

ekstra kampus (Alam, 2012:97). Mahasiswa selalu berasumsi bahwa sistem pemilihan jalan ini telah menjadi tempat bagi semua aktivis kampus, dalam hal ini, seorang siswa aktif dalam organisasi. Organisasi ekstra kampus menekankan dan mengembangkan organisasi mereka dengan memegang jabatan kekuasaan mahasiswa dibidang Ormawa. Mahasiswa ekstra kampus menggunakan cara untuk menarik tim sukses mereka, termasuk menempatkan mahasiswa yang belum berafiliasi dengan beberapa organisasi mahasiswa ekstra kampus (Ormek) sebagai tim sukses. Jajaran pengurus eksekutif partai adalah Ormek serta tidak mengecualikan kemungkinan bahwa komunikasi dibatasi oleh tim simpatisan menjadi tim pasca-hipotek menjadi sebagai member organisasi mereka. Cara ini dijalankan oleh semua Ormek.

Organisasi ekstra kampus adalah organisasi mahasiswa yang ada di luar kampus atau perguruan tinggi. Ormek umumnya memiliki kemandirian atau saling ketergantungan dengan organisasi massa atau partai politik, tetapi ada juga orang yang berafiliasi dengan komunitas dan organisasi pemerintah (Mufti, 2018:57). Dalam hal ideologi gerakan, setiap Ormek cenderung menegaskan identitas mereka sebagai bagian dari ideologi partai-partai politik dan beberapa organisasi massa. Di Unesa, jalan Ormek untuk berpartisipasi di kampus yaitu dengan sepak terjang politik yang tampak sama seperti partai-partai politik pada umumnya. Mahasiswa ekstra kampus mengendalikan kehidupan demokrasi pemilu di kampus untuk memperjuangkan presiden mahasiswa.

Organisasi mahasiswa ekstra kampus di Universitas Negeri Surabaya merupakan peran penting dalam pelatihan politik. Organisasi ekstra kampus itu sendiri mencakup pergerakan mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Islam (KAMI). Kesepakatan dalam kebijakan kampus juga memiliki kecepatan yang sama dengan proses ideologis. Kemenangan kebijakan pemilihan kampus sangat dipengaruhi oleh kemampuan Ormek dalam penguasaan akses ke pemerintahan mahasiswa untuk memfasilitasi proses kerangka kerja dan penanaman ideologi. Meskipun setiap Ormek memiliki ideologi yang dapat secara eksplisit dibedakan, tidak dapat mencegah mereka dari koalisi atau bekerja sama untuk memperjuangkan posisi pemerintahan mahasiswa. Ini adalah miniatur perjuangan politik nasional sebab hubungan antara organisasi mahasiswa ekstra kampus dan partai politik, atau organisasi masyarakat di luar kampus tidak hanya mempertimbangkan cara di mana mahasiswa ekstra kampus dalam pengejaran dan

pengembangan karier. Hubungan tersebut juga bisa bersifat ideologis dalam rangka mempertahankan identitas dan ideologi yang diperjuangkan oleh mereka (Bisma, 2017:95).

Pemira sudah menjadi suatu kegiatan rutin tiap tahun yang diselenggarakan di setiap Universitas untuk memilih Presma dan Wapresma kampus. Pemira menjadi sarana pendidikan politik yang cocok untuk mahasiswa untuk menumbuhkan dan melatih kesadaran dan partisipasi politik mereka (Sulistyo, 2019:2). Lihat realitas organisasi mahasiswa di Unesa saat ini menunjukkan beberapa konflik, salah satunya adalah metode refleksi primordial yang merusak beberapa kader organisasi mahasiswa ekstra kampus ketika berlangsungnya demokratisasi di kampus dalam bentuk Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BEM. Wacana “yang haram dalam politik adalah kekalahan” terus terngiang di kepala para kader masing-masing Ormek, sehingga konflik yang muncul dalam penyelenggaraan organisasi kemahasiswaan ini adalah sering mereka abai pada intelektualitas yang dimiliki dan berakibat pada tindakan vandalisme, rasa ingin menang berkuasa dan mendominasi mahasiswa terhadap organisasi intra kampus, rasa keberadaan mahasiswa kader untuk bergabung dalam organisasi, dan mengurangi tingkat kepercayaan mahasiswa pada kinerja organisasi. Ramlan Surbakti menjelaskan dibukunya tentang “Memahami Ilmu Politik” bahwa dalam semua keputusan yang dipilih tentu dapat menyebabkan dampak positif dan dampak negatif (Surbakti, 2010:30). Penjelasan itu mungkin bisa mewakili permasalahan yang terjadi di Unesa. Karena Ormawa yang mulanya dibuat untuk tempat untuk menampung aspirasi dan belajar politik untuk mahasiswa tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Banyak sekali dari kalangan mahasiswa yang membuat Ormawa dalam kampus menjadi ajang kompetisi yang akhirnya bisa timbul konflik.

Pemira tahun 2020 yang diharapkan akan memberikan dampak yang komprehensif bagi mahasiswa di Unesa, ternyata malah memberikan dampak negatif mulai dari kerusuhan dan konflik yang panas sampai terjadinya demo di gedung rektorat Unesa. Maka dari itu untuk menjadikan Pemira sebagai praktek demokrasi dan pendidikan politik yang tepat bagi seluruh mahasiswa. Maka seharusnya apabila dalam proses Pemira ada emosi yang berlebihan dan dapat memicu konflik, serta perpecahan guna untuk memenuhi kepentingan primordial kelompoknya harus dihilangkan. Pemikiran primordial yang destruktif oleh beberapa kader Ormek seharusnya tidak dijadikan kebiasaan dalam proses Pemira. Menang dan kalah dalam sebuah kompetisi merupakan suatu hal yang lumrah pasca kontestasi harusnya bisa saling sama-sama berkolaborasi, sehingga

seluruh civitas akademika Unesa bisa turut berpartisipasi dalam rangka mengharumkan nama institusi di mana Ormawa Unesa sebagai wadah untuk berproses bagi mahasiswa.

Dari uraian latar belakang di atas rumusan masalah yang ingin diteliti adalah bagaimana kepentingan primordialisme dalam praktek demokrasi perpolitikan di ormawa. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu kepentingan primordialisme dalam praktek demokrasi perpolitikan di Ormawa Universitas Negeri Surabaya oleh tiga. Ormek yaitu HMI PMII dan GMNI (Konflik Sosial dalam Pemira Bem Unesa 2020). Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis bagaimana kepentingan primordialisme dalam praktek demokrasi di ormawa. Dan mengidentifikasi ada atau tidaknya relasi antara kepentingan primordial dengan konflik sosial pada Pemira BEM U 2020.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori strukturalisme konflik Dahrendorf, teori ini dipengaruhi oleh konflik sosial Marx dan Simmel pada tahun 1950 hingga 1960. Menurut Ritzer dan Goodman, “teori konflik adalah alternatifnya fungsi struktural” teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah “teori strukturalisme konflik” (Dzulkifli & Harianto, 2017:3). Teori konflik ada sebagai reaksi dari teori fungsionalisme strukturalisme yang tidak memperhatikan fenomena konflik di masyarakat. Teori konflik adalah perspektif yang mempertimbangkan masyarakat sebagai sistem sosial yang terdiri dari berbagai kepentingan di mana ada upaya yang dibuat untuk menaklukkan elemen-elemen lain untuk memenuhi kepentingan lain atau mencapai minat terbesar mereka.

Dalam sistem sosial kehidupan, semua unsur melatih semua elemen menjadi anggota dari masyarakat untuk mendapatkan keteraturan dan realisasi kunci ekuilibrium (keseimbangan) dalam kehidupan masyarakat. Tetapi itu dikritik Dahrendorf, karena konflik adalah sebuah key struktur sosial dari Dahrendorf bahwa masyarakat membentuk dua pihak, yaitu sisi konflik dan kerja sama (konsensus) di dalam kehidupan masyarakat (Poloma, 1984:131). Pada kenyataannya, setiap individu mempunyai kepentingan masing-masing yaitu kepentingan individu ataupun kepentingan kelompok. Jika suatu kepentingan dapat dibicarakan dan terdapat persamaan sehingga bisa ditampung bersama, itu tidak mengecualikan kemungkinan bahwa ke 2 pihak dapat menyatu dan membuat kolaborasi yang disetujui bersama (konsensus), dan jika Kepentingan berbeda, mereka akan terbagi, dan mengakibatkan konflik untuk mencapai tujuan kepentingan masing-masing.

Dalam masyarakat seorang individu atau kelompok pasti mempunyai kekuasaan yang berbeda dengan intensitas yang berbeda. kekuasaan tak terletak pada

seseorang namun berada pada tempat sosialnya. Jadi, itu tidak statis. Sebagai contoh, seseorang bisa menjadi kuat atau memiliki kekuasaan di lingkungan A. Tetapi itu tidak berarti bahwa seseorang mempunyai kekuasaan di lingkungan B. Akhirnya dalam lingkungan seseorang tersebut pada tingkat Superordinate, tetapi di lingkungan B seseorang, dimungkinkan untuk ada di posisi bawahan atau subordinate. Kekuasaan itu menempel dalam posisi yang akhirnya menjadi *key* analisis Dahrendorf. Karena kekuasaan selalu ditafsirkan menjadi subordinat atau superordinat. Maka cocok dengan pembagian perannya, untuk seseorang atau golongan di wilayah yang superordinate, itu merupakan seorang yang memiliki kekuasaan dan mengontrol atas seseorang maupun golongan yang ada dalam tempat subordinat. Kelompok di posisi kekuasaan dan kelompok yang dikuasai yang sama-sama mempunyai minat waktu manajemen dan substansi bertentangan, maka pertikaian akan terjadi. Dan hal ini merupakan *key conflict* yang kedua dari teori konflik yaitu "kepentingan" (Ritzer George, 2011:155).

Kekuasaan berawal dari kata "kuasa" yang artinya kesanggupan atau kemampuan untuk melakukan sesuatu, mempunyai hak atau kekuasaan, sehingga memindahkan orang lain atau memengaruhi orang lain sehingga suatu tujuan tercapai. Lukes (1974) dalam studinya tentang kekuasaan membagi konsep tiga bagian ini, pada bagian pertama yang berkaitan dengan kemampuan seseorang atau golongan untuk mewujudkan keinginannya, yang berpusat terhadap aktor. Pada bagian kedua adalah bagian yang membutuhkan hubungan hierarkis oleh golongan sosial. Para aktor ada di dalam wilayah yang kuat karena mereka mempunyai kemampuan untuk dapat mencapai tujuan atau kepentingan yang lain. Bagian ketiga penghematan energi dengan menggunakan manipulasi agenda politik mencakup bujukan golongan-golongan subordinasi, yang dasarnya jelas untuk mengontrol dan membuat sensitisasi semu. (Faulks, 2010:24).

METODE

Penelitian ini telah dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Yang menggunakan metode studi kasus dengan perspektif teori konflik struktural Ralf Dahrendorf, di mana deskripsi dan penjelasan menyangkut berbagai aspek seseorang, kelompok, organisasi atau suatu situasi masyarakat sosial. Peneliti studi kasus berusaha untuk meninjau sebanyak mungkin data pada topik yang diteliti. Mereka sering menggunakan berbagai metode, wawancara (riwayat hidup), observasi, revisi dokumen, hasil (survei) dan semua data untuk menggambarkan kasus secara rinci (Mulyana, 2006:11). Dalam hal ini peneliti ingin memperoleh gambaran yang mendalam dan menyeluruh tentang kepentingan primordialisme dalam praktek demokrasi perpolitikan di Ormawa. Penggunaan

desain studi kasus akan menjelaskan mengapa kasus ini terjadi, dan memahami dengan kasus masa lalu serta pengembangannya untuk memberikan pandangan lengkap tentang topik yang dipelajari. Fokus di dalam penelitian ini adalah kepentingan primordialisme dalam praktek demokrasi perpolitikan dengan menunjuk pada Ormawa, dan mengetahui ada atau tidaknya relasi antara kepentingan primordialisme dengan konflik sosial pada Pemira BEM U 2020.

Peneliti menggunakan pendekatan perspektif teori strukturalisme konflik Ralf Dahrendorf karena dalam pendekatan perspektif teori strukturalisme konflik Ralf Dahrendorf membahas bahwa dalam teori konflik juga berbicara tentang otoritas yang berbeda. Otoritas yang berbeda ini menghasilkan superordinasi dan subordinasi. Perbedaan antara superordinasi dan subordinasi dapat menyebabkan konflik karena perbedaan kepentingan (Razak, 2017:124).

Informan adalah orang-orang yang benar-benar tahu dan atau terlibat langsung dalam fokus pada masalah untuk mendapatkan informasi dan ketentuan penting dengan fokus pada penelitian (Moleong, 2014:90). Mengacu pada pendapat Moleong di atas tentang informan penelitian adalah orang yang tentu memiliki kriteria dan dianggap sebagai aktor (penulis) dalam insiden (momen), atau seseorang yang memberikan informasi yang berkaitan dengan judul penelitian.

Teknik untuk menentukan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Desain sampling adalah teknik pemilihan sumber data dengan pertimbangan tertentu, pertimbangan khusus ini, misalnya orang yang dianggap mengetahui tentang fenomena konflik yang terjadi. Pemilihan informan didasarkan pada bukti-bukti bahwa yang bersangkutan memiliki pemahaman primordialisme dalam proses demokrasi di Ormawa. Atas dasar kriteria tersebut informan tertentu dalam penelitian ini ada 4 orang meliputi bapak Iman Pasu Marganda Hardianto Purba, S.H, M.H. sebagai informan kunci kemudian berdasarkan kriteria-kriteria dan pertimbangan tertentu informan selanjutnya adalah Yudha Auladana ketua umum PMII rayon sosial selanjutnya Ahmad Dwi Cahya Oktavian korkom HMI kemudian Mohammad Ilham Sultoni korkom GMNI. Demikian seterusnya proses pengambilan sampel ini berfungsi hingga informasi yang cukup diperoleh dan jumlah sampel memadai dan tepat untuk dianalisis agar dapat menarik kesimpulan.

Lokasi penelitian adalah di Universitas Negeri Surabaya (Unesa) dari alasan mengapa memilih tempat ini, karena tempat ini adalah tempat di mana aktivis kampus melakukan aktivitas mereka. Baik melakukan kegiatan konferensi, kegiatan organisasi, kegiatan diskusi

dan konsolidasi mereka. Kampus UNESA berada di beberapa tempat, yaitu: Ketintang dan Lidah Wetan.

Waktu studi yang bersangkutan untuk digunakan selama proses menyiapkan proposal sampai penelitian berlangsung dari tahap persiapan pada persiapan laporan sesuai dengan target penelitian. Dalam penelitian ini, waktu yang dibutuhkan sekitar delapan bulan, dapat dihitung dari Oktober hingga Mei.

Teknik pengumpulan data yang mengacu pada (Creswell, 2018:9) teknik dalam pengumpulan data penelitian studi kasus ini ada empat bagian teknik yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan materi audio visual. Karena merujuk dengan pendapat Creswell maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui empat metode, yaitu observasi tidak langsung, wawancara mendalam (*in-depth interview*), dokumentasi dan peralatan audio visual. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi lengkap tentang semua yang ingin peneliti jelajahi terkait dengan kepentingan primordialisme dalam praktek demokrasi perpolitikan di Ormawa, serta mengetahui ada atau tidaknya relasi antara kepentingan primordialisme dengan konflik sosial pada Pemira BEM U 2020.

Analisis data dalam penelitian ini dipandu oleh model analisis interaktif yang ditunjukkan oleh Huberman dan Miles (Sugiyono, 2011:246). Analisis data adalah proses penelitian dan organisasi sistematis yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan bahan lainnya, sehingga dapat dengan mudah dipahami dan hasil penelitian dapat diinformasikan kepada orang lain. Pemrosesan data dalam penelitian ini dilakukan melalui empat langkah. Karena analisis data dalam penelitian ini mengacu pada model analisis interaktif yang telah disajikan oleh Miles dan Huberman. Analisis data dimulai dengan 1) Pengumpulan data 2) Pengurangan data 3) penyajian data 4) penarikan kesimpulan atau disebut dengan verifikasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Primordialisme dalam praktek demokrasi perpolitikan di organisasi kemahasiswaan antara lain: (1) kepentingan primordialisme dalam politik di Ormawa, (2) primordialisme dalam Ormek (HMI, PMII, GMNI), (3) cara primordialisme tersebut di kelola dalam Ormek, (4) cara kepentingan primordialisme didistribusikan pada kader-kader Ormek, (5) konflik sosial pada Pemira BEM Unesa 2020, (6) representasi konflik, serta (7) sebab dan cara penyelesaian konflik. Dalam hal tersebut kepentingan primordialisme merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya konflik sosial pada Pemira BEM U 2020, sehingga kepentingan primordialisme dan konflik sosial tersebut memiliki relasi yang kuat.

Kepentingan primordialisme dalam politik di Ormawa

Kepentingan merupakan dasar dari kata penting yang termasuk dalam suatu homonim, sebab mempunyai hubungan/kekerabatan arti yang mempunyai ejaan serta pelafalan yang sama. Tetapi mempunyai makna yang berbeda, kepentingan bisa berarti suatu keperluan atau kebutuhan. Pada konteks kepentingan primordialisme dalam politik di Ormawa memiliki makna yang berbeda. Apabila suatu individu membentuk sebuah kelompok berdasarkan paham ideologi, atau ketertarikan terhadap suatu faktor seperti budaya, agama, suku/ras yang sama. Maka secara tidak sadar para anggota kelompok terus menumbuhkan ikatan-ikatan primordial seperti, loyalitas yang berlebihan sebab mereka akan mengutamakan dan menonjolkan kepentingan primordialisme kelompoknya. Dalam konteks politik jika setiap kelompok memiliki kepentingan primordialisme yang terorganisir secara politik, maka dapat menimbulkan terjadinya suatu politik aliran.

Primordialisme adalah suatu ikatan seseorang dalam kehidupan sosialnya yang memegang teguh pada hal-hal yang di bawah sejak mereka dilahirkan dalam bentuk suku, kepercayaan, ras, adat-istiadat, daerah kelahiran dan sebagainya (Kun Maryati, 2014:17). Atas dasar pemahaman di atas, dapat disimpulkan bahwa primordialisme adalah perasaan bahwa seseorang yang secara signifikan mengkonfirmasi ikatan sosial dalam bentuk nilai-nilai, standar dan kebiasaan dari tradisi dan budaya yang dibuat. Dari seorang yang lahir. Hal tersebut sesuai seperti pendapat Dosen Hukum serta Konsultan Hukum Unesa dan juga Pembina Ormawa FISH bapak Iman Pasu Marganda Hardianto Purba, S.H, M.H. (35) yaitu:

“...Primordialisme adalah suatu perasaan-perasaan yang dimiliki oleh seseorang misalnya kita yang sangat menjunjung tinggi ikatan sosial diantara kita dengan orang-orang seetnis, sebudaya, setradisi atau nilai-nilai dan norma-norma yang mengikat kita dengan komunitas kita...”

(Wawancara Sabtu, 10 April 2021).

Primordialisme dapat terjadi karena sesuatu yang dianggap istimewa atau spesial dalam suatu kelompok, seperti agama, budaya dan suku. Sikap mempertahankan integritas kelompok ancaman eksternal. Nilai yang terkait dengan sistem kepercayaan, seperti nilai-nilai agama. Adapun pendapat yang sesuai dari hal tersebut tentang primordialisme yaitu menurut Ketua Umum PMII rayon sosial Yudha Auladana (22) yakni:

“...Primordialisme merupakan sebuah paham yang dianut oleh individu yang berbentuk ketertarikan pertemanan, persahabatan, ataupun persaudaraan yang dilandasi oleh suatu kesamaan satu atau lebih dari beberapa faktor. Baik mulai dari kesamaan ras,

suku, budaya, bahasa, daerah, kepercayaan, agama, ideologi dan sebagainya sehingga masing-masing individu merasa memiliki jati diri yang sama dan membentuk komunal masyarakat dengan dasar primordial tersebut...”

(Wawancara Selasa, 30 Maret 2021).

Sikap primordialisme ini sangat mempengaruhi skema perilaku seseorang dalam hubungan sosial. Primordialisme dapat menegaskan hasil budayanya seseorang dan memiliki rasa loyalitas yang sangat tinggi. Jika seseorang tidak dapat beradaptasi dengan keadaan masyarakat multikultural, sikap primordialisme ini akan mengarah pada konflik sosial yang dapat membagi keharmonisan antara penduduk (Prayitno & Yanzi, 2017:5). Hal ini didukung dengan pendapat Dosen Hukum serta Konsultan Hukum Unesa dan juga Pembina Ormawa FISH bapak Iman Pasu Marganda Hardianto Purba, S.H, M.H. (35) yaitu:

“...Primordialisme merupakan suatu hal yang bagus-bagus saja ketika proporsinya tepat karena kalau tidak tepat proporsinya akhirnya yang tadinya ia bersifat positif bagaimana menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada di komunitas dan norma-norma yang ada atau kecintaan akan komunitas atau kelompok bisa itu berubah menjadi berbahaya ketika dia membiarkan primordialisme itu membangun jarak yang membuat dia terdisintegrasi dengan yang lain atau tidak merasa kelompok lain menjadi bagiannya sehingga terjadi diskriminasi dan perpecahan antara suku, kelompok atau dengan komunitas lain kalau kita terlalu menempatkan rasa primordialisme tidak pada tempatnya...”

(Wawancara Sabtu, 10 April 2021).

Primordial dalam arti sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan seseorang yang secara tradisional berada di tengah-tengah masyarakat, adalah sesuatu yang terus hadir di masa lalu sejauh ini dan juga sebagai kesadaran kolektif. Sifat primordialisme dalam konteks ini adalah minat yang terkait dengan masalah abstrak seperti induk intensitas solidaritas. Dalam hal ini, primordialisme dianggap sebagai elemen fakta yang utuh dan universal oleh beberapa kelompok organisasi. Dengan primordialisme ini dianggap sebagai representasi dari bentuk kerja sama yang bekerja untuk memaksimalkan kepentingan individu. Oleh karena itu, primordialisme dianggap sebagai perilaku individu dalam hubungan sosial di mana kelompok individu mengalami kesulitan meningkatkan dan meningkatkan nasib/kualitas dalam kelompok dan memiliki visi dan misi yang sama. Seperti yang disampaikan oleh Koordinator Komisariat GMNI Mohammad Ilham Sultoni (23) yaitu:

“...Kebanyakan dari kalangan mahasiswa yang berkuliah atau menuntut ilmu di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Malang,

Yogyakarta, Semarang dan kota lainnya merupakan mahasiswa daerah yang memiliki keberagaman suku dan budaya, kemunculan primordialisme di kalangan mahasiswa berkemungkinan terjadi dan sangat sulit terhindar dalam bersosialnya yang akan membentuk berbagai pengelompokan yang berkotak-kotak seperti sosio-kultural mahasiswa berdasarkan kesukuan dan kedaerahannya yang memiliki visi dan misi yang sama...”

(Wawancara Sabtu, 27 Maret 2021).

Primordialisme dianggap sebagai pemenuhan kebutuhan material atau sebagai ekspresi kepentingan bersama. Dengan menggunakan suatu cara dan tindakan tertentu guna memperoleh dan mempertahankan pengaruh dan aksesibilitas dalam konteks politik. Hal ini Sesuai dengan pernyataan Yudha Auladana (22), Ketua Umum PMII Rayon Sosial Unesa.

“...Jika berbicara tentang politik saya pikir semua aktifitas seseorang tentu dan pasti mengandung unsur-unsur politis namun kalau berbicara primordialisme dalam berpolitik atau yang kita maknai sebagai kontestasi pemira itu merupakan suatu hal yang sah-sah saja, perlu diingat bahwa OKP itu adalah organisasi kaderisasi yang semua prosesnya dinamakan proses ideologisasi yang orang awam sering menyebutnya ORMEK. Karena organisasi tersebut tidak terikat sebatas satu kampus terkait melainkan lintas kampus sehingga, seluruh OKP harus memiliki pakem kaderisasi, visi misi, dan tujuan yang baik dan tidak keluar dari konstitusi bernegara kita. Selanjutnya ketika anggota dirasa sudah mampu melalui proses kaderisasi dengan baik, maka di saat pemira itulah kontestasi antar kader yang dimiliki oleh masing-masing OKP/ORMEK dipertarungkan secara kompetensi dan kapasitasnya...”

(Wawancara Selasa, 30 Maret 2021).

Senada dengan pernyataan Yudha Auladana menurut Ahmad Dwi Cahya Oktavian (25) Koordinator Komisariat HMI berpendapat:

“...Saya memahami politik sebagai cara ataupun usaha untuk mendapatkan sebuah tujuan yang kita inginkan walaupun memang banyak orang yang berpandangan bahwa politik itu lebih merujuk pada hal sejenis kekuasaan. Pandangan saya tentang primordialisme dalam berpolitik terutama di organisasi kemahasiswaan atau di lingkungan kampus boleh saja selagi tidak mengakibatkan kerusakan yang merugikan masyarakat serta lingkungan itu, karena menurut saya paham apapun itu pasti mempunyai celah dan kekuatan setiap bagian kita sebagai penganut paham tersebut menempatkannya di lingkungan kampus, keluarga, atau masyarakat sesuai dengan proporsinya...”

(Wawancara Minggu, 4 April 2021).

Primordialisme dalam politik pada organisasi mahasiswa memiliki dampak negatif dan positif. Bagi seseorang yang memiliki primordialisme kuat, maka dia

akan menganggap kelompok mereka yang paling utama dibandingkan dengan kelompok yang lain dan berujung mengabaikan kepentingan bersama. Apalagi jika sampai kepada taraf fanatik sehingga merugikan orang lain dan banyak pihak. Tetapi jika sikap primordialisme ini proporsional atas kepentingan bersama dengan cara yang terbaik dan memperhatikan hal-hal lain bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah maka akan tercipta suatu keadilan di mana kepentingan dapat diakomodasikan bersama. Hal ini diperkuat dengan pendapat bapak Iman Pasu Marganda Hardianto Purba, S.H, M.H. (35) selaku Dosen Hukum serta Konsultan Hukum Unesa dan juga Pembina Ormawa FISH.

“...Secara natural rasa primordialisme pasti muncul dalam suatu kelompok-kelompok organisasi atau komunitas dan tentunya memiliki dampak positif dan dampak negatif, mahasiswa sebagai manusia yang berakal budi, berproses dan berdinamika dalam kehidupan sosial dan interaksi sosialnya maka secara positif akan menjunjung tinggi ikatan sosial dan nilai-nilai dikelompoknya untuk memperjuangkan kepentingan bersama sehingga ada rasa solidaritas. Sedangkan sisi negatifnya adalah apabila hal ini tidak terjadi secara proporsional dan berlebihan maka akan bahaya terutama dalam konteks kampus karena akhirnya atas nama kelompok kita, kita akan mengabaikan kepentingan bersama...”

(Wawancara Senin, 12 April 2021).

Primordialisme dalam Ormek (HMI, PMII, GMNI)

Organisasi mahasiswa ekstra kampus adalah organisasi mahasiswa yang bergerak dijangkauan eksternal kampus atau perguruan tinggi. Organisasi ekstra umumnya memiliki kemandirian atau saling ketergantungan dengan organisasi massa atau partai politik, tetapi juga ada yang berafiliasi dengan organisasi masyarakat dan pemerintah (Mufti, 2018:57). Dalam hal gerakan ideologi, setiap organisasi mahasiswa ekstra kampus (Ormek) cenderung menegaskan identitasnya sebagai bagian dari ideologi partai politik dan beberapa organisasi massa. Pernyataan tersebut didukung dengan pernyataan Mohammad Ilham Sul-toni (23) Koordinator Komisariat GMNI yaitu:

“...Organisasi mahasiswa ekstra kampus adalah organisasi mahasiswa yang memiliki aktivitas dalam luar lingkup Universitas atau perguruan tinggi, ormek memiliki cakupan yang berada diluar birokrasi kampus di mana wilayah gerakanya cenderung nasional yang memiliki ideologi mereka masing-masing...”

(Wawancara Sabtu, 27 Maret 2021).

Organisasi mahasiswa ekstra kampus di Unesa di antaranya meliputi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), yang, tentu saja, organisasi memiliki ideologi dan visi misi

organisasi yang berbeda. untuk menghasilkan primordialisme yang berbeda-beda juga.

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) adalah sebuah organisasi yang dibuat di Yogyakarta pada 5 Februari 1947 untuk bertepatan ke tanggal 14 Rabiul pada awal 1366 H dengan inisiatif komponen Lafran dengan 14 mahasiswa Islam Yogyakarta. Organisasi ini adalah gerakan siswa berbasis siswa di mana organisasi ini memiliki tujuan, yaitu: di mana akademisi, pencipta, pediatri, yang bernafaskan islam dan bertanggung jawab untuk mencapai kehidupan yang adil dan makmur dan Diridhai Allah SWT. Seperti yang dijelaskan oleh Ahmad Dwi Cahya Oktavian (25) Koordinator Komisariat HMI.

“...Dalam nilai dasar perjuangan kami di HMI kami juga diarahkan bagaimana menjadi manusia yang merdeka dengan pandangan-panfangan atau paham-paham yang kita yakini di antara norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat yang juga harus kita jalankan sebagai makhluk sosial. Himpunan Mahasiswa Islam berperan sebagai bagian dari Generasi muda yang menyadari hak-haknya dan kewajibannya dan memiliki peran dan tanggung jawab kemanusiaan, Muslim dan penduduk Indonesia untuk memberikan Dharma Dharma untuk mencapai nilai-nilai Islam untuk realisasi lounge dan kemakmuran diberkati oleh Allah Swt. Asosiasi siswa Islam sebagai organisasi kerangka itu harus menjadi alat perjuangan untuk mengubah tindakan Gagasana terhadap formulasi, penciptaan masyarakat akademik, pencipta, pediatri yang menghirup Islam dan bertanggung jawab atas realisasi masyarakat makmur yang diberkati oleh Allah SWT...”

(Wawancara Selasa, 6 April 2021).

Organisasi merupakan sesuatu yang bersifat abstrak namun dapat dirasakan keberadaannya, baik oleh anggota organisasi maupun masyarakat luar. Schein menerangkan jika organisasi merupakan rangkaian ikatan aturan dan aktivitas dari beberapa individu agar dapat mewujudkan tujuannya dengan cara pembagian jobdesk dan fungsinya menggunakan metode hierarki kekuasaan (Daulay, 2014:98). Pernyataan ini sesuai dengan pendapat Ahmad Dwi Cahya Oktavian (25) Koordinator Komisariat HMI Unesa yakni:

“...HMI yang berperan menjadi Organisasi kader memiliki platform yang jelas dalam persiapan agendanya dengan semakin dekat dengan realitas masyarakat dan secara konstan dapat membangun proses dialerik yang objektif untuk mencapai tujuannya....”

(Wawancara Selasa, 6 April 2021).

Setiap organisasi mahasiswa pasti memiliki primordialisme yang berbeda-beda dan perlu adanya pemahaman mengenai hal tersebut karena jika tidak memahami batas-batas dalam berorganisasi maka kita akan terjebak ruang organisasi iklusif atau bisa disebut

tertutup dari bentuk kritik sehingga dapat melenceng dalam praktek atau implementasinya. Hal ini sesuai dengan pendapat Ahmad Dwi Cahya Oktavian (25) Koordinator Komisariat HMI bahwa:

“...Banyak sekali organisasi yang mempunyai primordialisme yang menurut pendapat saya baik akan tetapi memang dalam praktek dan cara pengaplikasiannya tidak sama melainkan berbeda-beda dan tak jarang melenceng karena adanya berbagai faktor, tetapi bukan organisasinya yang melenceng melainkan oknum kadernya...”
(Wawancara Selasa, 6 April 2021).

Pergerakan mahasiswa Islam Indonesia (PMII) adalah salah satu organisasi kampus mahasiswa ekstra (Ormek) yang terus bercita-cita untuk mewujudkan Indonesia menjadi lebih baik. PMI dibuat pada 17 April 1960 dengan *background* dari situasi politik pada 1960-an, yang memaksa siswa untuk berpartisipasi dalam pewarnaan kehidupan sosial politik di Indonesia. Pembentukan PMII dimotivasi oleh kalangan muda NU. Pendirinya antara lain adalah Mahbub Djunaedi dan Subhan Ze (mereka adalah jurnalis dan politisi legendaris). Organisasi siswa ini didasarkan pada Ahlusunnah Wal Jama'ah (Asawat), yang bertindak sebagai malajul fikr (metodologi pemikiran) dan manhajul harakah (metodologi bertindak / berperilaku). Di antara mereka, Tawasuth (moderat), Tawazun, Tasamuh (toleran) dan Ta'adul (keadilan). Sesuai yang dituturkan oleh Yudha Auladana (22), yang merupakan Ketua Umum PMII Rayon Sosial Unesa.

“...Primordial di dalam PMII meliputi membumikan nilai-nilai nasionalisme dan keislaman yang bernafaskan Ahlussunnah Waljama'ah An-Nahdliyah di kampus-kampus. PMII adalah organisasi kemahasiswaan yang diberi mandat oleh PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) untuk menjadi ujung tombak dalam berdakwah. Dalam pergerakannya, PMII senantiasa menjadi garda terdepan benteng NKRI, karena dalam PMII ada istilah yang disebut Habbul Wathon Minal Iman yang artinya mencintai tanah air merupakan sebagian dari iman sehingga dapat dipastikan kader-kader dari PMII menjunjung tinggi nilai-nilai kebhinekaan dan memiliki rasa toleransi yang tinggi secara lintas ras, suku, agama dan juga budaya supaya dapat bersikap adil demi keseimbangan bersama...”

(Wawancara Selasa, 30 Maret 2021).

Gerakan mahasiswa nasional Indonesia (GMNI) adalah organisasi siswa di Indonesia. Organisasi ini adalah gerakan mahasiswa yang didasarkan pada ajaran Marhaenisme. Marhaenisme diambil dari kata Marhaen yang berarti orang yang tertindas, Marhaenis adalah orang-orang yang berjuang untuk hak-hak populasi yang tertindas, sementara marhaenism itu sendiri adalah pemahaman (ideologi) tentang Marhaen. GMNI dibentuk

pada 22 Maret 1954 sebagai hasil gabungan dari tiga organisasi mahasiswa, yang termasuk pergerakan siswa Marhenis, pergerakan mahasiswa Merdeka dan pergerakan mahasiswa demokrasi Indonesia. Seperti yang ditegaskan oleh Catur Ambyah Budiwarsono (23) selaku Agitasi Propaganda GMNI.

“...Ketika berbicara tentang primordialisme organisasi ekstra kampus terkhususnya GMNI tidak terlepas dari ideologi organ yakni “Marhaenisme” yang menjadi ideologi fundamental di GMNI. Jika ditarik secara sejarah, sejarah marhaenisme sendiri ditemukan melalui pola pikir dan galian-galian pemikiran Soekarno. Dari situ Soekarno memiliki pemikiran bahwa Sistem Kapitalisme akan hilang ketika dilawan dengan adanya “Trisakti” yang menjadi cikal bakal marhaenisme yang meliputi: 1) Berdikari secara ekonomi, 2) Berdaulat secara politik dan kemudian, 3) Berkepribadian kebudayaan. Serta didukung oleh “Trisila” Soekarno yang menjadi miniatur dari marhaenisme yakni: 1) Sosio Nasionalis, 2) Sosio Demokratis dan 3) Ketuhanan. Sosio nasionalis. Jadi kalau berbicara tentang primordialisme GMNI sendiri tidak jauh dari hal tersebut yang mana GMNI sendiri menjadi sebuah media atau alat untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia, untuk menumpas sistem kapitalisme itu dengan mewujudkan trisila Soekarno yang tujuannya untuk merealisasikan trisakti Soekarno, yang diharapkan GMNI menjadi sebuah wadah untuk pemuda itu bergerak baik itu mengkritisi, menyadarkan, mengakomodir massa yang berorientasikan pada kesejahteraan masyarakat. Jadi intinya marhaenisme adalah sebuah anti tesis dari sistem kapitalisme...”
(Wawancara Jumat, 23 April 2021).

Cara Primordialisme tersebut di kelola dalam Ormek (HMI, PMII, GMNI)

Dalam pelaksanaannya Ormek menggunakan sistem yang berbeda-beda mulai dari sistem pengkaderan dan juga cara khusus untuk primordialisme tersebut dikelola di dalam Ormek. Ormek yang ada di Universitas Negeri Surabaya memberikan peranan penting dalam pendidikan politik. Pergolakan politik di dalam kampus mempunyai sebuah ritme/melodi yang sama dengan suatu pelaksanaan progres ideologisasi. Kemenangan dalam politik elektoral di kampus benar-benar ditetapkan oleh kesanggupan Ormek dalam pengendalian jalan masuk pemerintahan mahasiswa untuk mempermudah pelaksanaan kaderisasi dan penanaman ideologi (Bisma, 2017:95). Seperti yang ditegaskan oleh Yudha Auladana (22), ketua umum PMII rayon sosial Unesa.

“...Seluruh Ormek tentunya memiliki pakem kaderisasi, visi-misi dan tujuan yang berbeda termasuk pengkaderan dan cara untuk mengelola primordialisme dan penanaman ideologi dalam

Ormek masing-masing. Proses kaderisasi adalah proses penempatan kompetensi intelektualitas spiritualitas atau “Kawah Candradimuka” bagi para anggota sehingga kelak menjadi kader yang kompeten dan kompetitif serta dipersiapkan sebagai seseorang yang ulul albab atau seseorang yang kelak memiliki nilai kebermanfaatan di manapun ia berada. Baik di lingkungan masyarakat, birokrasi atau institusi terkait di manapun dan dibidang apapun ia berada...”

(Wawancara Selasa, 30 Maret 2021).

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ia melakukan upaya pengkaderan atau kaderisasi pada calon kader mereka dengan cara khusus seperti yang disampaikan oleh Koordinator Komisariat HMI Ahmad Dwi Cahya Oktavian (25) yaitu:

“...Dalam upaya pengkaderan di HMI dilakukan dengan pendekatan presuasif dan berdiskusi adapun cara khusus untuk meningkatkan loyalitas para kader-kader Ormek dengan memahami minat kader itu sendiri dan membuat ruangan-ruangan pengembangan diri yang kader minati serta meningkatkan jaringan atau relasi...”

(Wawancara Senin, 5 April 2021).

Selanjutnya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dalam melakukan proses kaderisasi di PMII harus melalui beberapa jenjang pendapat ini sesuai dengan yang dipaparkan oleh Ketua Umum PMII rayon sosial Unesa, Yudha Auladana (22) yaitu:

“...Di dalam PMII mempunyai beberapa jenjang pengkaderan yang meliputi 1) MAPABA (Masa Penerimaan Anggota Baru), 2) PKD (Pelatihan Kader Dasar), 3) PKL (Pelatihan Kader Lanjut), 4) PKN (Pelatihan Kader Nasional). Sama halnya dengan jenjang pendidikan pada SD-SMP-SMA yang harus berurutan dan berjenjang, ibarat kata seperti halnya setelah SD tidak boleh langsung ke jenjang SMA harus melalui proses yang berurutan secara formal, di PMII harus berurut dan berjenjang agar mendapatkan hasil yang maksimal...”

(Wawancara Selasa, 30 Maret 2021).

Untuk meningkatkan loyalitas dan penanaman ideologi antara kader-kader PMII juga memiliki cara-cara khusus dalam melakukannya dengan adanya guru pembimbing masing-masing dan berbagai acara non-formal seperti yang di jelaskan oleh Ketua Umum PMII rayon sosial Unesa, Yudha Auladana (22).

“...Pendidikan di dalam NU dan PMII syarat akan sanad dan nasab yang dimaksud adalah garis keilmuan dan garis keturunannya tentu dalam proses kaderisasi untuk meningkatkan loyalitas dan penanaman ideologi antara kader-kader PMII terdapat mentor atau guru masing-masing yangnantinya akan bermuara pada kegiatan-kegiatan yang bersifat non-formal serta melakukan treatmen-treatment bagi para anggota, memberikan stimulan dalam berproses serta mengarahkan

sehingga pada anggota tersebut terbimbing dengan baik selain untuk senantiasa menjaga silaturrahmi kepada Mas/Mbak alumni yang telah lebih dulu berproses di PMII dan telah menggeluti dunia profesionalisme masing-masing. Hal ini selain untuk menjaga garis keilmuan, juga untuk menegaskan bahwasannya OKP tidak mengenal masa (periode) ideologisasi atau kaderisasi tidak sebatas pada masa kemahasiswaan melainkan hingga akhir hayat...”

(Wawancara Rabu, 31 Maret 2021).

Kemudian Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) upaya-upaya yang dilakukan untuk melakukan pengkaderan kepada calon-calon kader tentunya berbeda dari cara yang dilakukan oleh HMI ataupun PMII ia melakukan cara melalui pengenalan organisasi mahasiswa ekstra kampus kepada kader dengan cara membuka stand-stand organisasi. Hal ini ditegaskannya melalui wawancara dengan Koordinator Komisariat GMNI Mohammad Ilham Sultoni (23).

“...Dalam upaya-upaya pengkaderan dalam GMNI dilakukan melalui pengenalan organisasi mahasiswa ekstra kampus dengan cara membuka stand-stand organisasi dan tanpa adanya paksaan untuk mengikuti ORMEK dan perlu digaris bawahi mengikuti ORMEK bukan sebagai ajang kompetisi tetapi untuk mencari ilmu dan pengalaman untuk menghadapi keberagaman masyarakat dan kemajemukannya...”

(Wawancara Sabtu, 27 Maret 2021).

GMNI juga memiliki cara-cara khusus dalam meningkatkan rasa loyalitas kader-kader Ormeknya yaitu dengan cara penanaman-penanaman nilai pada anggota kader serta keaktifan kader dalam mengikuti setiap agenda komisariat seperti yang disampaikan oleh Koordinator Komisariat GMNI Mohammad Ilham Sultoni (23) yakni:

“...Cara khusus dalam meningkatkan rasa loyalitas kader Ormek GMNI yaitu dilakukan dengan menumbuhkan rasa tanggung jawab dan rela berkorban dengan mencurahkan pemikiran dan keterampilan dan keikutsertaan dalam setiap agenda komisariat seperti acara kaderisasi, diskusi, dan lomba-lomba. Serta taat peraturan dan memiliki tanggung jawab kepada komisariat serta kemauan untuk bekerjasama...”

(Wawancara Sabtu, 27 Maret 2021).

Cara Kepentingan Primordialisme didistribusikan pada kader-kader Ormek (HMI, PMII, GMNI)

Kepentingan mempunyai arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga suatu kepentingan bisa mengistilahkan nama dari sebuah daerah, seseorang, maupun suatu benda dan segala yang dibendakan. Kepentingan dapat diartikan interes, yang berarti keperluan atau kebutuhan. Dalam konteks praktek demokrasi di dunia kampus banyak sekali kelompok yang terbentuk dengan ideologi dan primordialisme yang

berbeda-beda tidak terkecuali Ormek. Setiap Ormek memiliki strategi masing-masing dalam mendistribusikan kepentingan mereka.

Pada Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) memiliki cara tersendiri dalam mendistribusikan kepentingan organisasi mereka agar tetap terjaga dan berjalan dengan lancar seperti melakukan agenda pertemuan-pertemuan antara kader secara rutin untuk membahas serta mengevaluasi suatu progres. Seperti yang disampaikan oleh Ahmad Dwi Cahya Oktavian (25) selaku Koordinator Komisariat HMI Unesa.

“...Di dalam HMI komunikasi yang dilakukan oleh antar kader agar kepentingan dalam suatu organisasi tetap terjaga yaitu dengan cara melakukan pertemuan-pertemuan yang sudah dijadwalkan rutin untuk membahas dan mengevaluasi suatu progres...”
(Wawancara Senin, 5 April 2021).

Dalam menjaga suatu kepentingan organisasi agar tetap dipegang teguh oleh para kader-kader HMI untuk melindungi dan memperjuangkan kepentingan kelompok tersebut maka ada strategi yang digunakan yaitu dengan menjaga hubungan-hubungan baik antar kader. Sesuai yang disampaikan oleh Ahmad Dwi Cahya Oktavian (25), Koordinator Komisariat HMI bahwa:

“...Dalam menjaga supaya kepentingan dalam organisasi tetap terjaga dan dipegang teguh oleh para kader-kader HMI kita memiliki strategi dimana kita harus saling menjaga hubungan antara kader-kader dengan baik...”
(Wawancara Senin, 5 April 2021).

Kemudian Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) mereka mendistribusikan kepentingan organisasi mereka melalui berbagai komunikasi yang dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung supaya tidak ada miskomunikasi yang terjadi antara anggota kader sehingga kepentingan organisasi dapat berjalan dengan lancar. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Yudha Auladana (22), Ketua Umum PMII rayon sosial Unesa, yaitu:

“...Dalam mendistribusikan suatu kepentingan organisasi agar tetap berjalan lancar PMII melakukan komunikasi dengan berbagai cara *face to face* atau dengan *mobilling celuler phone*, lalu sama-sama mengikuti kegiatan-kegiatan yang bersifat informal atau nonformal. Karena adanya pandemi covid-19 ini merubah kita untuk senantiasa melakukan adaptasi dengan cepat yang akhirnya membuat kita saling bertukar chat *whatsapp* untuk berdiskusi atau sama-sama melakukan *google meet* untuk membahas kepentingan organisasi ataupun untuk membahas isu-isu terkini...”
(Wawancara Rabu, 31 Maret 2021).

Strategi yang dilakukan oleh PMII dalam menjaga kepentingan organisasi agar tetap dipegang teguh oleh

para kader yaitu dengan cara mendidik OKP supaya menjadi kader yang baik sesuai dengan nilai-nilai dan primordialisme yang ada di PMII, sehingga dalam pendidikannya terdapat unsur *achievement* dan unsur *punishment* agar anggota menjadi terdidik dan terpelajar sehingga kepentingan organisasi tetap dipegang teguh oleh kader dan dapat mencapai taraf kaderisasi yang baik. Sesuai yang dijelaskan oleh Yudha Auladana (22), Ketua Umum PMII rayon sosial yakni:

“...Organisasi ekstra atau OKP tentu berbeda dengan organisasi intra baik di eksekutif ataupun di legislatif. Dalam organisasi ekstra melakukan pendidikan dan pengajaran, pengajaran yang dilakukan tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan melainkan juga ada transfer nilai-nilai kaderisasi dari ideologi Ahlul sunnah Waljama'ah An-Nahdliyah. Selain dididik dan diajari para anggota juga senantiasa melihat, mendengar dan merasakan setiap detail dari lingkungan berprosesnya. Untuk menjadi kader muda intelektual NU tiap-tiap anggota juga melestarikan amaliyah-amaliyah dari NU. Disamping itu dalam proses pendidikan terdapat unsur *achievement* dan unsur *punishment* agar para anggota menjadi terdidik dan terpelajar serta dapat memegang teguh kepentingan organisasi dan mencapai taraf kaderisasi yang baik dan benar...”
(Wawancara Rabu, 31 Maret 2021).

Selanjutnya adalah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dalam mendistribusikan kepentingan organisasinya agar tetap terjaga dan berjalan dengan lancar GMNI melakukan cara agenda diskusi rutin pada setiap acara dan mengajak para kader untuk saling bersilaturahmi antar anggota kader. Seperti yang disampaikan oleh Mohammad Ilham Sultoni (23), selaku Koordinator Komisariat GMNI Unesa.

“...Cara yang digunakan untuk menjaga kepentingan organisasi agar dapat tetap terjaga dan berjalan dengan lancar yaitu dengan cara mengadakan suatu agenda diskusi rutin pada setiap agenda acara tentunya untuk membahas progres dan juga mengajak para kader untuk saling bersilaturahmi antar kader...”
(Wawancara Sabtu, 27 Maret 2021).

Setiap Ormek memiliki strategi yang berbeda dalam menjaga kepentingan organisasi mereka supaya tetap dipegang teguh oleh para kader-kadernya. Dalam hal itu GMNI melakukan strategi dengan cara membagi *job description* masing-masing yang telah direncanakan dan disepakati bersama. Hal ini seperti yang diucapkan oleh Mohammad Ilham Sultoni (23), Koordinator Komisariat GMNI.

“...Strategi yang dijalankan agar kepentingan dalam organisasi tetap dipegang teguh, yaitu dengan cara membagikan *job description* masing-masing sesuai dengan yang telah direncanakan dan

disepakati bersama untuk menjadi laporan yang akan diserahkan ke pihak di cabang kota...”
(Wawancara Sabtu, 27 Maret 2021).

Konflik Sosial pada Pemira BEM Unesa 2020

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya yang disingkat dengan sebutan BEM-U merupakan suatu Organisasi mahasiswa yang mempunyai fungsi eksekutif ditingkat Universitas dan dipimpin oleh presma atau ketua, BEM-U juga merupakan Organisasi tertinggi yang ada di Unesa yang secara struktur organisasi BEM-U menaungi seluruh mahasiswa Unesa. Hal ini didasarkan atas Keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor: 457/UN.38/HK/KM/2020 tanggal 30 April 2020 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Negeri Surabaya. Dan berdasarkan SOP penyelenggaraan kegiatan Organisasi mahasiswa dan unit kegiatan mahasiswa tanggal 02 November 2020.

BEM Unesa ialah wujud struktur sosial formal dalam kampus yang di dalamnya terdapat member yang dinamakan mahasiswa, dalam organisasi ini ada peraturan regulasi mengikat para membernya serta mempunyai kerangka kekuasaan hierarkis dan mempunyai metode rumit. Sebab jabatan Ketua BEM U yang hanya diduduki oleh orang tunggal karenanya sering sekali diperebutkan. karena Ketua BEM U memiliki kekuasaan lebih tinggi diperbandingkan dengan member-member lainnya. Konflik sosial terjadi sebab adanya seorang pemeran/aktor yang melaksanakan pelaksanaan konflik hal yang demikian. Menurut hasil penelitian data di atas, karenanya pemeran yang terlibat dalam konflik Pemira BEM U 2020 mencakup dari dua bagian wilayah yaitu internal dan eksternal di wilayah internal pemerannya meliputi, Mahasiswa, Dosen, BEM, dan Birokrat sedangkan di wilayah eksternal meliputi Ormek

Representasi Konflik

Pemilihan umum raya BEM Unesa 2020 merupakan sebuah wadah untuk berproses bagi semua mahasiswa Universitas Negeri Surabaya yang bertujuan untuk memilih Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) serta untuk memilih anggota Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) tingkat universitas. Pemira ialah tempat untuk bersaing Ormek baik yang berbasiskan dengan ideologi Islam ataupun nasionalis (Alam, 2012:93). Sebagian Ormek besar berkompetisi dengan mencalonkan kadernya agar menjadi pimpinan pada struktur pemerintahan tinggi Ormawa dalam kampus. Anggota BEM Unesa demisioner menyiapkan pentas persaingan dengan menyusun Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).

Pemira BEM Unesa pada jangka waktu 2020 diikuti oleh tiga Ormek besar, yaitu HMI, PMII, dan GMNI. Ralf Dahrendorf di bukunya yang berjudul *“conflict and conflict in industrial society”* menjelaskan kalau dalam tatanan kehidupan bermasyarakat akan muncul sebuah konflik atau perselisihan yang di mana munculnya golongan-golongan di kehidupan bermasyarakat. Akhirnya golongan-golongan masyarakat tersebut dikategorikan jadi dua bagian golongan yaitu golongan kepentingan dan golongan semu (Dahrendorf, 1986:221).

Gambaran tersebut bisa untuk kita posisikan Ormek menjadi golongan kepentingan. karena telah jelas bahwa Ormek mempunyai sebagian indikator untuk diposisikan sebagai golongan kepentingan. Di antaranya Ormek mempunyai kerangka dalam organisasi, format organisasi, visi dan misi organisasi, dan member organisasi. Kemudian asosiasi yang ada di dalam kampus adalah golongan semu karena dalam asosiasi mempunyai suatu kepentingan tersembunyi. Kepentingan tersembunyi dispekulasi menjadi kepentingan kongkrit. Golongan semu merupakan sebuah daerah untuk memasukkan para anggota golongan kepentingan yang terorganisir secara terang. kekuasaan pada Presiden Mahasiswa menghasilkan *“key conflict”* dalam situasi ini. Karena kekuasaan Presiden Mahasiswa yang diperebutkan dalam Praktek demokrasi tersebut.

Pemira 2020 adalah pemira yang sangat sensitif dengan pertikaian, Pemira yang di harapkan akan memberikan dampak yang komprehensif bagi seluruh mahasiswa di Unesa, ternyata malah memberikan dampak negatif, mulai dari kerusuhan dan konflik yang panas sampai terjadinya demo di gedung rektorat Unesa yang mengakibatkan kerusakan beberapa fasilitas kampus.

Pada Pemira 2020 KPUR Unesa sudah tidak menerapkan asosiasi lagi, semenjak tahun 2016 golongan asosiasi telah vakum salah satu unsur penyebab vakumnya ialah sebab konflik asosiasi ketika Pemira BEM U yang mengakibatkan BEM U dibekukan. Tapi dalam sebagian fakultas asosiasi masih berlaku seperti pada Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) dan Fakultas Ilmu Olahraga (FIO). Pada Pemira 2020 di kala itu ada 6 asosiasi yang meregistrasikan diri dan lolos, 6 asosiasi ini antara lain contohnya dari HMI dengan asosiasi Tor dan Amora. Dari PMII dengan asosiasi Formasi dan Aksara. Dan dari GMNI dengan asosiasi Barong dan Formal. Asosiasi yaitu suatu organisasi yang memperoleh keabsahan dari MPM yang memiliki fungsi hampir sama dengan partai politik yang ada di Indonesia. asosiasi memang sengaja diciptakan oleh beberapa Ormek untuk perwakilan mereka yang memiliki keabsahan di dalam kampus. Di sisi lain hal tersebut diterapkan sebagai kendaraan untuk berpolitik dari sebagian elit kampus.



Gambar 1 Sejumlah mahasiswa unesa melakukan aksi anarkis dengan membakar jas almamater. (Sumber : iNewsJatim.id 16, Maret 2020)

Pada tahun 2020 proses Pemira mengalami sebuah kegagalan yang disebabkan terjadinya konflik ditataran mahasiswa. Pada waktu itu ada dua paslon kandidat yang mencalonkan diri sebagai, Presiden dan Wakil Presiden BEM di kampus Unesa yang diselenggarakan pada 24 Februari 2020. Pasangan paslon nomor urut 01 adalah M. Satria Arta Wahab (capres) Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum dan Agung Alaska (cawapres) Mahasiswa Fakultas Ilmu Olahraga sedangkan, paslon nomer urut 02 adalah M. Badrus Sholeh (capres) Mahasiswa Fakultas Teknik dan Dimas Alif P.A (cawapres) Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan. Dalam pemilihan tersebut, paslon nomor urut 01 mendapatkan suara sebanyak 2.728 sedangkan, paslon nomor urut 02 mendapatkan suara sebanyak 3.263 suara mahasiswa. Akan tetapi ketua KPUR menetapkan SK bahwa pemenang BEM U 2020 adalah paslon 01 yang sudah jelas bahwa paslon 02 lah yang menang dan unggul dalam pendaptatan suara. Seperti yang diungkap oleh Miftachul Abar Nurrohman seorang Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Unesa, kericuhan disebabkan oleh tindakan KPU Pemira Unesa yang tiba-tiba membuat Surat Keputusan (SK) pada tanggal 27 Februari 2020.

“...Di dalam Surat Keputusan (SK) tersebut para oknum dari KPU Pemira Unesa, terkesan memiliki dalih untuk wewenang mutlak dalam menentukan siapa yang dapat menjadi seorang pemenang dalam pemilihan BEM Unesa, sehingga tampak jelas bagaimana KPU Pemira Unesa tanpa alasan yang jelas tiba-tiba memotong suara paslon nomor urut 02 sebanyak 25%, agar kemenangan paslon nomor urut 01 terkesan demokratis...”
(Wawancara pada, 02 Maret 2020).

Keputusan yang diambil oleh KPU Pemira Unesa akhirnya menimbulkan kerusuhan dan konflik di kalangan civitas akademika Unesa. Pasalnya Pemira Unesa dalam proses pemilihan BEM sudah berjalan dengan tenang, baik dan juga lancar meskipun ada beberapa gesekan karena sikap dari oknum mahasiswa

KPU Pemira Unesa yang pada saat sebelum pemilihan BEM, KPU Pemira Unesa dengan alasan yang tidak jelas telah mencoret paslon nomor urut 02 dari kandidat pemilihan, Keputusan itu kemudian diprotes oleh beberapa kalangan mahasiswa Unesa, dan setelah dimediasi oleh pihak rektorat, akhirnya KPU Pemira Unesa tidak jadi mencoret paslon nomor urut 02. Setelah proses pemilihan BEM berlangsung dengan baik, tenang dan juga lancar, tiba-tiba KPU Pemira Unesa, membuat SK bahwa paslon nomor urut 01 yang jelas lebih sedikit mendapatkan suara dari mahasiswa dinyatakan sebagai pemenang pada Pemira BEM. Maka hal tersebut yang akhirnya memicu konflik social di civitas akademika Unesa ini.

Horizontal conflict muncul sebab yang terkait didalam *conflict* adalah para mahasiswa dengan sesama mahasiswa. karenanya ada keselarasan didalam peran sosialnya. kesamaan hak serta keharusan membuat dua hal merekat terhadap peran sosial semua mahasiswa. Meskipun Ormek ataupun BEM Unesa adalah sebuah pranata sosial yang dua hal tersebut merupakan tempat berkumpul dan berproses mahasiswa. Dinamika *social conflict* yang ada dalam kampus tak luput dari unsur-unsur di dalamnya. Unsur-unsur itu mencakup dosen dan birokrasi. Kompetisi Pemira menyertakan berbagai guru besar ataupun pemerint kampus yang mempunyai basis keyakinan yang sama. Karena bagaimanapun mereka pernah jadi mahasiswa dan di antaranya dulu jugapernah aktif di organisator mahasiswa. Maka akan terjalin relasi di antara yang satu dengan yang lainnya.

Penyebab dan Cara Penyelesaian Konflik

Kepentingan primordialisme adalah salah satu unsur penyebab terjadinya *social conflict* pada kalangan Ormawa. Primordialisme sendiri adalah sebuah ikatan perasaan yang dipunyai oleh seseorang dimana benar-benar menjunjung tinggi tali sosial dengan orang-orang seetnis, sebudaya, setradisi atau suatu poin-poin dan etika-etika yang mengikat dengan suatu golongan yang dicontoh oleh individu. Sikap primordialisme benar-benar memberi pengaruh gaya sikap seseorang di dalam ikatan sosialnya. Primordialisme bisa membuat seorang individu seseorang benar-benar sangat meyakini kebudayaan dan mempunyai rasa kelayakan tinggi pula. Jika individu tak dapat beradaptasi dalam sikap primordial ini dalam kehidupan masyarakat yang beragam, karenanya akan bisa memicu suatu *social conflict* yang bisa memicu perpecahan dan keharmonisan di antara golongan masyarakat. Pernyataan tersebut didukung dengan pernyataan Koordinator Komisariat GMNI Unesa, Mohammad Ilham Sultoni (23), yaitu:

“...Menurut saya akar permasalahan itu dari perbedaan primordial bendera dan perbedaan

ideologi dikalangan mahasiswa yang permasalahannya menjalar ke pihak birokrasi kampus. Dari perbedaan tersebut ada beberapa pihak yang memperlakukan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh panitia pemira contohnya: (1) Lupa menginstruksikan untuk mencelupkan jari ke tinta bagi peserta yang sudah memakai hak suaranya. (2) Panitia lupa menyetempel kertas pemungutan suara (pemira sebelum pandemic) ...”

(Wawancara Sabtu, 27 Maret 2021).

Perbedaan kepentingan primordialisme tersebut yang akibatnya memicu konflik sosial seperti kata Ralf Dahrendorf dalam teorinya. Teori konflik Ralf Dahrendorf amat memandang fenomena konflik di dalam masyarakat. Teori konflik merupakan suatu perspektif yang memperhatikan masyarakat menjadi sebuah metode sosial yang terdiri oleh kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda di mana ada suatu usaha untuk mengalahkan bagian yang lain guna memenuhi kepentingan lainnya atau memperoleh kepentingan sebesar-besarnya. Di dalam suatu metode sosial yang ada dalam kehidupan bermasyarakat seluruh unsur di masyarakat melaksanakan peran mereka menjadi member di masyarakat, sehingga dapat tercipta sebuah keteraturan dan ekuilibrium (keseimbangan). Melainkan di dalam hal tersebut dikritik oleh Ralf Dahrendorf karena *conflict* adalah kunci dari teori konflik. Bahwa dalam kerangka sosialnya dalam suatu masyarakat memiliki dua sisi, yaitu sisi konflik dan sisi kerja sama (konsensus) (Poloma, 1984:131).

Di kenyataannya seorang individu mempunyai kepentingan masing-masing baik kepentingan individu atau kepentingan golongan. Saat kepentingan itu bisa dibicarakan kemudian terdapat persamaan maka bisa diakomodasikan, karenanya tak menutup kemungkinan bahwa dua pihak itu melakukan kerjasama yang telah disetujui (konsensus), demikian pula sebaliknya. Sehingga yang terjadi dalam konflik sosial Pemira BEM Unesa salah satu unsur penyebabnya ialah kepentingan primordial yang berbeda.

Kemudian faktor berikutnya yaitu perebutan keberadaan. Organisasi mahasiswa memerlukan keberadaan atau eksistensi untuk mendukung pekerjaannya dalam dunia politik tidak terkecuali dalam politik kampus. Eksistensi mahasiswa di kampus benar-benar menolong mereka untuk membentuk sebuah jaringan (tautan) keatas. Mulai dari tautan kedekatan dengan pemerintah kampus ataupun kedekatan dengan partai-partai politik. Wilayah elite mahasiswa menjadi poin tersendiri bagi para organisasi kampus saat melaksanakan komunikasi dengan jajaran birokrasi maupun pemerintah. Sebab wilayah elite mahasiswa memiliki peran untuk menjalankan mobilisasi massa, sehingga

dengan demikian para elite mahasiswa menerima perhatian spesial dari pemerintahan atau birokrasi kampus.

Perubahan mahasiswa tidaklah bisa terlaksana dengan massif jikalau tak ada para aktivis mahasiswa yang mempunyai kesanggupan untuk menjadi penggagas dalam tiap pergerakan mahasiswa, dalam mencari spot persoalan bersama lalu kemudian diagendakan sehingga bisa mewujudkan landasan baru pada suatu pergerakan mahasiswa. Organisasi mahasiswa 1998 dapat diwujudkan suatu ilustrasi bahwa para elite mahasiswa memakai keberadaannya untuk menolong diri mereka didalam dunia politik. Para aktor organisasi di angkatan 1998 yang pada waktu itu menjadi pemimpin lapangan aksi demonstrasi di kala meruntuhkan kepemimpinan Soeharto, sekarang telah jadi politisi berhasil dalam kalangan pemerintahan. Pemimpin lapangan tersebut dilihat berbagai partai politik. sebab mempunyai poin tersendiri saat menjadi seorang mahasiswa.

Misalnya Fahri Hamzah, beliau merupakan salah satu mahasiswa Universitas Indonesia (UI) yang ia merupakan tokoh dari aksi demonstrasi tahun 1998 sekarang ia menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI dari politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), kemudian Adian Napitupulu, dahulu beliau yaitu mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia (UKI) beliau juga merupakan aktivis pada aksi demo di tahun 98. Sekarang beliau telah menjadi seorang politikus hebat di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Dan selanjutnya yaitu Wanda Hamidah, beliau adalah seorang mahasiswa dari Universitas Trisakti beliau adalah aktivis wanita dalam aksi penggulingan kekuasaan Soeharto pada masa orde baru di tahun 1998 dan sekarang beliau menjadi politikus Partai Amanat Nasional (PAN).

Gambaran situasi tersebut sekaligus menjadi salah satu alasan kenapa eksistensi pada kampus menjadi rebutan para organisasi mahasiswa. Organisasi mahasiswa pastinya mempunyai keinginan untuk jadi orang yang terpendang, karenanya mereka semua menyiapkan semua pelaksanaannya seluruh sedari menjadi mahasiswa sehingga saat mereka menjadi mahasiswa mereka selalu rajin dan aktif didalam suatu organisasi selanjutnya akan jadi seorang aktivis mahasiswa yang saat lulus mereka bisa dilirik dan dimasukkan dalam partai-partai politik. Sehingga mereka dapat menjadi seorang politikus partai politik.

Fenomena situasi pragmatisme. saat ini jadi referensi baru pada seorang mahasiswa. tarif perkuliahan kian kesini menjadi kian mahal membikin para mahasiswa untuk berfikir kembali saat mengabdikan dirinya untuk menjadi seorang organisasi, malah ketika mereka menjadi organisasi bahkan akan memperhitungkan

untung dan rugi. Sehingga tak lagi bersifat lapang dada saat memerjuangkan idealisme dan ideologinya. Independensi mahasiswa yaitu sebuah komoditi jalan serta tergantikan dengan beraneka kepentingan-kepentingan tertentu.

BEM U yang secara struktur kelembagaan diberhentikan oleh birokrasi kampus dan sumber dananya berasal dari akumulasi 5% total tarif perkuliahan pada suatu kampus menghasilkan daya tarik bagi para aktivis mahasiswa. Organisasi BEM Unesa adalah wadah bagi para mahasiswa berproses dan belajar berorganisasi cuma dibuat sebagai alasan normatif saja. Karena selebihnya Cuma kepentingan-kepentingan di mana secara implisit disisipkan sebagai tujuan yang salah. Kepentingan yang demikian merupakan sebuah orientasi provokatif, jika di dalam bahasanya Dahrendorf. menyebutnya kepentingan yang terselubung. Mahasiswa. serta orientasi pemikiran pragmatis seperti ini kini telah tak lagi. jadi pemikiran seseorang melainkan berkembang menjadi pragmatisme. kolektif. Sehingga ada suatu kumpulan individu/orang untuk bersatu dan memiliki cita-cita yang sama lalu menyusun sebuah golongan-golongan.

Golongan demikian yang akan menjadi sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan dan menduduki kursi Presma BEM U, yang singkatnya golongan yang berselisih tersebut, mereka berselisih untuk memperebutkan jabatan dan otoritas dengan tujuan agar bisa menguasai anggaran dana yang diberikan oleh birokrasi. Dalam Ormawa BEM Unesa terdapat juga anggaran yang sangat besar, penguasa struktur BEM U juga bisa membikin aktivitas biasanya disebut dengan Program Kerja (Proker) yang bertujuan untuk meningkatkan mutu mahasiswa, tetapi dalam hal yang demikian ada sisi keuntungannya yaitu bantuan-bantuan keuangan/dana dari para pematari atau dari sponsorship untuk operasional aktivitas.

Di tahun politik-politik nasional senantiasa jadi sebuah tempat tepat untuk para pembawa kekuasaan dalam kampus. Karena di tahun ini banyak sekali para politikus-politikus yang akan melaksanakan kampanye-kampanye pemenangan mereka. BEM unesa yang berperan sebagai struktur organisasi tertinggi di tingkat kampus mempunyai poin tersendiri untuk melakukan *cooperation* bersama dengan para tokoh. BEM U bisa memberikan sebuah pentas untuk para politikus dan sebaliknya, mereka memberikan sumbangan dana kampanye sebagai rasa timbal balik dari pentas yang diberikan. Golongan ini tak memiliki sifat tendensi pada salah satu calon kandidat tetapi, hal tersebut dapat ditawarkan kembali kepada calon-calon kandidat yang lainnya sehingga, dapat ditarik kesimpulan bahwa anggaran kampanye tersebut masuk didalam internal BEM U kemudian jika anggaran dana tersebut sudah masuk dalam internal BEM, maka akan dilaksanakan suatu pembagian dana yang

pada biasanya 10% untuk Presma BEM selaku pimpinan dari Ormawa BEM U kemudian 20% untuk penyalur aktivitas kegiatan dan baru sisanya bisa untuk dibagi-bagikan kepada golongan-golongan yang lain yang menunjang terlaksananya kegiatan tersebut.

Dahrendorf menjelaskan bahwa adanya sebuah pembagian otoritas-otoritas yang tak merata. Sehingga hal tersebutlah yang bisa memicu timbulnya perselisihan/konflik pada mahasiswa. Otoritas tersebut meliputi keputusan dan wewenang yang akhirnya bisa disimpulkan bahwa dalam struktur Ormawa BEM U terdapat dua. golongan yaitu golongan yang berkuasa dan golongan yang dikuasai. Golongan penguasa adalah golongan yang mempunyai otoritas/kekuasaan untuk mengontrol jalannya Ormawa BEM U sedangkan golongan yang dikuasai adalah golongan-golongan yang tidak bisa untuk mencapai otoritas-otoritas tersebut.

Otoritas/kekuasaan Presma BEM jadi sebuah *key* (kunci) dalam konflik difenomena yang terjadi saat ini. Sehingga otoritas/kekuasaan ini yang diperebutkan dalam kompetisi Pemira. Pemegang kendali kekuasaan/otoritas ini di harapkan bisa untuk mengatur bawahannya. Kekuasaan/otoritas ini tak bersifat konstant melainkan ada di jabatan Presma BEM. Seseorang aktivis elite di Ormek tak seharusnya mengendalikan otoritas/kekuasaan didalam struktur Ormawa BEM Unesa begitupula sebaliknya. Seseorang mahasiswa yang ada dalam lingkungan Ormek di posisi kelompok subordinat bisa saja menempati posisi kelompok superordinat pada jabatan Ormawa BEM Unesa. Kelompok tersebutlah yang dijelaskan oleh Dahrendorf sebagai kordinasi secara imperatif. Pembagian otoritas/kekuasaan sebelum Pemira 2020 terlaksana menunjukkan bahwa HMI menjadi golongan yang berkuasa atau superordinat dan golongan-golongan yang lain seperti GMNI dan PMII sebagai golongan yang dikuasai atau subordinat. Golongan-golongan tersebut didasarkan atas klasifikasi kemenangan pada saat Pemira. Ormek HMI pada saat pemilihan di tahun sebelumnya yaitu di 2018-2019 menjadi pemenang dalam pemilihan tersebut jauh pada tahun sebelumnya di tahun 2014/2015 pada saat BEM U dibekukan HMI selalu menang pada saat Pemira sehingga mayoritas dari struktur fungsionaris BEM U diisi oleh kader-kader dari HMI dan sisanya secara minoritas baru diisi oleh kader-kader dari Ormek lainnya. Apabila dilihat dari posisi dan perannya yang diduduki kelompok penguasa senantiasa menempati posisi-posisi yang strategis dan juga mempunyai peran yang sentral, sedangkan kelompok yang dikuasai berada pada posisi yang kurang strategis dan perannya kurang untuk diperhitungkan dalam struktur organisasi atau lebih simpelnya mereka hanya sebagai komplemen pada struktur organisasi tersebut.

Selama empat tahun sesudah BEM U dibekukan di 2015, Pemira di 2016-2019 ketua BEM Unesa berasal dari HMI karenanya dari itu HMI sebagai golongan yang mendominasi. Dominasi ini tentunya akan selalu dipertahankan dan diperjuangkan seperti yang dijelaskan oleh Dahrendorf yaitu dalam struktur sosial seorang individu atau kelompok yang mempunyai otoritas/kekuasaan yang mendominasi struktur tersebut maka akan berusaha untuk selalu mempertahankan “*status quo*” dan sedangkan kelompok yang terdominasi maka akan selalu menginginkan dan memperjuangkan sebuah perubahan. Akan tetapi dalam realitanya dalam fenomena tersebut tidak terjadi perubahan dengan mudah, karena mereka mengalami kegagalan, dan kekalahan yang berulang-ulang maka dari itu dominasi ini dianggap sebagai sebuah prasasti kekuasaan. Karena proses dominasi yang terlalu lama membuat kelompok yang didominasi sangat menginginkan adanya perubahan dalam tatanan sistem.

Karena kelompok yang didominasi sadar bahwa jika dominasi berjalan sangat lama maka akan menimbulkan semua kepentingan-kepentingan atau aspirasi dan saran mereka tidak dapat tercapai dan diakomodasikan dengan maksimal. Para kelompok penguasa senantiasa berbuat seenak mereka dalam menentukan sebuah kebijakan. Baik berupa tentang kebijakan regulasi atau peraturan undang-undang lainnya. Tetapi pada akhirnya Pemilihan umum 2020 kemarin mengalami perubahan ketua BEM Unesa karena ketua BEM U berasal dari PMII. Pertikaian antara kelompok penguasa dan kelompok yang dikuasai tampak sangat jelas terlihat, ketika Pemilihan umum 2020 berlangsung. Akhirnya pada konflik sosial Pemira BEM U 2020 kemarin Universitas Negeri Surabaya membuat tindakan tegas untuk penyelesaian konflik tersebut Wadep III Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Unesa Dr. Bambang Sigit Widodo, M.Pd. menjelaskan sudah membentuk Tim Komisi Disiplin (KOMDIS) untuk mengusut dan menyelesaikan konflik yang terjadi.

“...Tim bertugas melakukan penelusuran tentang konflik dan memberikan sanksi kepada mahasiswa yang jelas-jelas melakukan pelanggaran, tim juga berkoordinasi bersama dengan pihak kepolisian jika aksi dari mahasiswa tersebut ada unsur pidananya. Tetapi kami tetap menerapkan asas praduga tak bersalah karena bagaimanapun mereka anak-anak kami...”

(Wawancara pada 16 Maret 2020).

Kebijakan tentang SK Rektor mengenai pelantikan BEM U 2020 sudah bulat, tidak dapat diganggu gugat karena dalam mengambil keputusan dalam mengesahkan struktur organisasi pengurus yang baru, Rektor telah meminta tolong kepada Warek III agar melakukan kajian/audiensi yang melibatkan Ahli Hukum Administrasi dan Tatanegara agar mendapat hasil yang

obyektif dan adil tidak kebijakan sesaat dan asal-asalan, ketika menunggu hasil dari audiensi/kajian tersebut Rektor pun tak ceroboh untuk mengambil sebuah kebijakan dan mengesahkan pemenang pemilihan umum Ketua BEM U. Melainkan hasil kebijakan diputuskan melalui tahapan audiensi/kajian yang matang. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ketua Umum PMII rayon sosial Unesa, Yudha Auladana (22).

“...Terkait dengan penyelesaian konflik yang terjadi pihak rektorat melakukan beberapa audiensi dengan pihak pelapor dan terlapor. Terkait dengan hasil rekapitulasi sengketa Pemira 2020 dengan menghadirkan praktisi hukum. Salah satunya adalah Bpk. Ananto (Dosen Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum) dari audiensi tersebut akhirnya mendapatkan sebuah hasil bahwa apa yang dituduhkan secara hukum tidak dapat dibuktikan. Sehingga segala tuduhan yang dilaporkan tidak dapat ditindak lanjuti kembali dan diputuskan bahwa kemenangan Pemira 2020 tidak memihak kepada paslon nomer 01 jadi Pemira 2020 dimenangkan oleh paslon nomer 02...”

(Wawancara Kamis, 1 April 2021).

Berdasarkan dari pernyataan tersebut dapat dikemukakan bahwa pihak birokrasi juga berupaya secara adil dan obyektif dalam menyelesaikan konflik sosial yang terjadi di Civitas Akademika Unesa bukan memihak salah satu pihak saja tetapi benar-benar mengambil keputusan dengan matang.

Pembahasan

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa, dinamika konflik yang terjadi pada struktur kehidupan sosial akan menimbulkan sebuah golongan superordinate dan golongan subordinate. Golongan penguasa berada pada posisi kelompok superordinate dan kelompok yang dikuasai berada pada posisi subordinate. Hal ini didasarkan karena sistem demokrasi yang mengarah pada pendapatan suara paling banyak, merupakan “*one people one vote*”. Golongan penguasa dengan jelas adalah kelompok yang memiliki massa dan suara terbanyak dari mahasiswa. Meskipun golongan/kelompok subordinate merupakan kelompok yang kalah saat kompetisi Pemira, yang disebabkan karena kalah dalam jumlah perolehan suara dan jumlah massa.

Akhirnya karena ada dua bagian kelompok di mana pada posisi superordinate dan subordinate. Maka otoritas yang menempel pada posisi-posisi tersebutlah yang menjadi “*key*” dari analisa Ralf Dahrendorf. Karena otoritas/kekuasaan sering diibaratkan dengan suatu superordinasi maupun subordinasi. Cocok sesuai pembagian perannya untuk seorang individu ataupun kelompok apabila mereka ada di wilayah superordinate maka merekalah yang jadi penguasa dan mendominasi seorang individu ataupun kelompok. Begitu pula

sebaliknya. Golongan yang menempati wilayah otoritas/kekuasaan tertentu pasti mempunyai kepentingan masing-masing, jadi bila suatu kepentingan-kepentingan tersebut memiliki arah dan substansi yang berbeda atau bahkan berlawanan yang membuat kepentingan tersebut tak dapat diakomodasikan karenanya akan timbul sebuah “*conflict*” dan “*second key*” dari teori konflik Dahrendorf ialah “*interest*” (Ritzer George, 2011:15).

Perselisihan/konflik yang terjadi begitu keras akan menyebabkan sebuah konflik sosial yang berlarut-larut jika tidak segera diselesaikan. Karena konflik/perselisihan tersebut sudah tidak sehat yang mengarah pada kerusakan fasilitas umum. Pada tahun sebelumnya di tahun 2018 dan 2019 Pemira berjalan lancar dalam hal kontestasi tentu wajar ada sedikit gesekan-gesekan tetapi tidak sampai berlarut-larut dan menimbulkan konflik, Pemira ditahun sebelumnya selalu dimenangkan oleh kader dari Ormek HMI tetapi pada tahun 2020 terjadi perubahan, suara terbanyak diperoleh dari Ormek lain di paslon dengan nomer urut 02. Dalam pemilihan tersebut, paslon nomor urut 01 mendapatkan suara sebanyak 2.728 sedangkan paslon nomor urut 02 mendapatkan suara sebanyak 3.263 suara mahasiswa. Akan tetapi ketua KPUR menetapkan SK bahwa pemenang BEM U 2020 adalah paslon 01 yang sudah jelas bahwa paslon 02 lah yang menang dan unggul dalam pendaptatan suara. Akhirnya timbul keributan yang disebabkan oleh tindakan KPU Pemira Unesa yang tiba-tiba membuat Surat Keputusan (SK).

Dalam SK tersebut para oknum KPU Pemira Unesa, membuat keputusan tentang pemotongan suara paslon 02 sebanyak 25%, karena dirasa ada beberapa hal yang tidak adil kemudian ketua KPU Pemira Unesa memenangkan paslon nomer urut 01 yang kemudian memicu timbulnya konflik. Setelah terjadi konflik yang mengakibatkan kerugian materil karena terjadi aksi vandalisme dan kerusakan beberapa fasilitas di dalam dan sekitar gedung rektorat, kemudian elektabilitas dan eksistensi Unesa menurun akibat aksi tersebut tidak hanya diberitakan oleh media internal di Unesa melainkan juga media lokal Surabaya bahkan, platform media nasional juga memberitakan hal tersebut. Sehingga pihak birokrat Unesa langsung mengadakan audiensi kajian dan membentuk tim komisi disiplin untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Rektor Unesa Prof. Nurhasan, M. Kes. meminta kepada Warek III untuk mengadakan kajian/audiensi yang melibatkan Ahli Hukum Administrasi dan Tata Negara Unesa agar mendapatkan hasil yang obyektif dan adil. Kemudian Wadep III Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Unesa Dr. Bambang Sigit Widodo, M.pd. juga sudah membentuk Tim Komisi Disiplin (Komdis) untuk menyelidiki kasus dan menyelesaikan konflik yang terjadi.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari permasalahan dan pembahasan yang sudah dipaparkan, simpulan mengenai primordialisme dalam praktek demokrasi di organisasi kemahasiswaan serta relasinya dengan konflik sosial. dalam Pemira BEM Unesa 2020 adalah: Konflik sosial yang terjadi membagi dalam dua komponen yaitu “*conflict vertikal*” dan “*conflict horizontal*”. Konflik tersebut dilaterebelakangi oleh enam faktor di antaranya adalah: (1) perbedaan kepentingan primordialisme, (2) ideologi Ormek, (3) perebutan kekuasaan antar golongan atau individu, (4) adanya Orientasi/kekuasaan provitt, (5) distribusi otoritas/kekuasaan terjadi tak adil dan tak merata, dan yang terakhir yaitu, (6) adanya suatu fenomena golongan penguasa yang berkeinginan untuk melanggengkan kekuasaannya.

Maka dari itu karena kepentingan primordialisme merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya konflik sosial pada Pemira BEM Unesa 2020, sehingga antara kepentingan primordialisme dan konflik sosial yang terjadi memiliki ikatan relasi kuat satu sama lain.

Dari sebagian elemen-elemen penyebab dari konflik yang terjadi akibatnya terjadi gesekan-gesekan di dalam tatanan kehidupan sosial. Yang akhirnya dari kompetisi antar kelompok Ormek itu menghasilkan. Kelompok superordinate dan subordinate. HMI sebagai kelompok superordinate kemudian GMNI dan PMII sebagai kelompok subordinate.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dari permasalahan dan pembahasan yang sudah dipaparkan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut: (1) Bagi Mahasiswa, sebaiknya dalam belajar politik dan demokrasi tak seharusnya diwarnai dengan aksi keributan dan emosi yang berlebihan yang memicu tindakan pidana. Doktrin-doktrin pemikiran yang salah harus dihilangkan sebab menang kalah dalam kontestasi adalah hal yang wajar dan lumrah. (2) Bagi ORMEK, tidak boleh bersikap seenaknya untuk memenuhi kepentingan primordialisme kelompoknya tapi seharusnya dapat bertoleransi maka perlu adanya kesadaran bahwa disamping ada kepentingan primordial kelompoknya juga ada kepentingan-kepentingan lain yang harus diakomodir agar dapat terjadi sebuah ekuilibrium (keseimbangan). (3) Bagi Universitas Negeri Surabaya di harapkan dapat selalu berperan aktif dan mengawal bersama proses pelaksanaan Pemira, guna untuk membina pembelajaran politik dan demokrasi bagi mahasiswa dan warga Unesa, serta memberikan dukungan yang lebih besar terhadap Ormawa terkait pelaksanaan program kerja terutama dukungan moril dan pendanaan. (4) Bagi Peneliti

selanjutnya, Penelitian ini sangat menarik untuk ditindaklanjuti serta dimaksimalkan. Karena mengingat dalam perkembangan struktur kehidupan sosial mahasiswa yang dinamis dan tentunya senantiasa berubah-ubah, sehingga dalam setiap pelaksanaannya. Akan muncul perubahan tatanan struktur sosial baru di dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, Wira Yudha. 2012. Aktivisme Mahasiswa Organisasi Ekstra Kampus Dalam Pemilihan Umum Raya Mahasiswa Fisip Unair. *Jurnal Politik Indonesia*. Vol. 1 No 2. Hal 91-99.
- Bisma, Ginanjar Gesang Bayu. 2017. "Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus Islam Di Universitas Airlangga (Pandangan Tentang Wacana Prospek Demokrasi Dan Relasi Negara Agama)". *Jurnal Politik Muda*. Vol. 6 No. 2, Hal 94-100.
- Creswell, John W. 2014. *Research Design Qualitative Quantitative Mixed Methods Approaches Fourth Edition*. SAGE Publication, Inc.
- Dahrendorf, Ralf. 1986. *Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri*. Jakarta : CV Rajawali
- Daulay, M. (2014). Peran Organisasi Dakwah dalam Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan . *Hikmah*, VII(1), 98–106.
- Dzulkifli, M., & Harianto, S. 2017. MAHASISWA DAN KEKUASAAN (Konflik Sosial Pada Pemilihan Umum Raya Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya 2013 sampai 2015). *Jurnal Paradigma*. Vol.05 No.01. Hal 1-14.
- Faulks.Keith. 2010. *Sosiologi politik pengantar kritis*. Bandung : Nusa media
- Kun Maryati. 2014. *Sosiologi*. Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri
- Maloeng, Lexy J. 2012. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung : P.T Remaja Rosda Karya
- Meleong, Lexy J. 2014. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Mufti, Dwi Fajar. 2018. "Internalisasi Nilai Nasionalisme Mahasiswa Melalui Organisasi Ekstra Kampus (Deskriptif Pada Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesian Cabang Tulungagung)". *Jurnal Rontal Keilmuan PKN*. Vol. 4 No. 2. Hal 57-65.
- Mulyana, D. 2006. *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Poloma, Margaret M. 1984. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta : CV Rajawal
- Prayitno. 2017. "Pengaruh Sikap Primordialisme Terhadap Upaya Pembentukan Proses Harmonisasi Masyarakat Multikultur". *Jurnal Fkip Unila*. Vol.05 No.03. Hal 1-16.
- Razak, Zulkifli. 2017. " *Perkembangan Teori Sosial (Menyongsong Era Postmodernisme)* ". Makassar : CV Sah Media
- Retta, Lensi Megah. 2017. "Strategi Komisi Pemilihan Umum Raya Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Raya Serentak Di Fis Unesa Tahun 2015". *Jurnal Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*. Vol.05 No.01. Hal 136-150.
- Ritzer.George dan Douglas J. Goodman. 2011. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta :Kencana Prenada Media.
- Rozi, Syafuan. 2009. "Nasionalisme, Demokratisasi dan Sentimen Primordialisme di Indonesia: Problematika Identitas Keetnisan Versus Ke Indonesiaan Pada Studi Kasus, Aceh, Papua, Bali, dan Riau". *Jurnal politik*. Vol.06 No.01. Hal 75-84.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan : Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sulistyo, Edi. 2019. "Partisipasi Politik Mahasiswa Dalam Pemilihan Umum Raya". *Jurnal Paradigma*. Vol. 7 No. 4. Hal 1-6.
- Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Taufiq, Mohammad. 2014. "Resistensi Gerakan Mahasiswa Terhadap Kapitalisasi Pendidikan (Studi Organisasi Eksternal Kampus di Unesa)". *Jurnal Paradigma*. Vol.02 No.03. Hal 1-13.